

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Pusat Kerja Sama Luar Negeri disusun sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pusat Kerja Sama Luar Negeri sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditentukan.

Dalam melaksanakan mandat yang telah dibebankan oleh penyelenggara pemerintah, Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kerja Sama tersebut pada hakekatnya adalah hubungan kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan dan mendukung kepentingan pembangunan pertanian nasional.

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. RENCANA STRATEGIK

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Kerja Sama Luar Negeri telah menyusun Rencana Strategik yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang ditempuh untuk pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya karena adanya penataan organisasi lingkup Kementerian Pertanian maka Rencana Strategik Pusat Kerja Sama Luar Negeri tahun 2010 – 2014 mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Visi

Dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertanian di dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, maka Pusat Kerja Sama Luar Negeri merumuskan **Visi** yakni menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri dirumuskan sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerja sama luar negeri yang mendukung *Grand Strategy* pembangunan pertanian nasional
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral
4. Terwujudnya peran sebagai leading diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan

6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerja sama luar negeri bidang pertanian
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima,

3. Tujuan

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Kerja Sama Luar Negeri, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: meningkatkan kerja sama teknis dan ekonomi Indonesia melalui kerangka Kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral.

4. Sasaran

Guna mencapai tujuan yang diinginkan maka Pusat Kerja Sama Luar Negeri menyusun sasaran organisasi dimana masing-masing sasaran dimaksud terdapat indikator kinerja yang ingin dihasilkan selama periode tahun 2010 - 2014, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah

terjalinnnya kerja sama dengan pihak luar negeri, baik negara maupun lembaga internasional yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang pertanian.

5. Program Kerja

Program kerja Pusat Kerjasama Luar Negeri yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra yang akan dimuat dalam Formulir Rencana Strategik (RS) pada Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah:

- a. Koordinasi Pengembangan Kerja sama Bilateral bidang pertanian;
- b. Koordinasi pengembangan kerja sama Regional bidang pertanian;
- c. Koordinasi pengembangan kerja sama Multilateral bidang pertanian; dan
- d. Koordinasi Tata Usaha Pusat Kerja sama Luar Negeri dan Pembinaan Atase Pertanian.

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri tahun 2012 meliputi Satu Program yaitu: **Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian**

I. Kegiatan Tahun 2012 yaitu :

1. Nota Kesepakatan kerjasama Pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral ;
 - a. Penyusunan/Pengolahan/Pengumpulan/Updating Data Statistik
 - b. Penyusunan Laporan Pengembangan Hubungan Kerja sama Luar Negeri yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Kerja sama Internasional melalui Kerangka Multilateral;
 - b. Peningkatan Kerja sama Internasional Melalui Kerangka Regional;
 - c. Peningkatan Kerja sama Internasional Melalui Kerangka Bilateral
 - d. Penyusunan Bahan, Naskah Perjanjian dan Posisi kerjasama Bilateral
 - e. Pengembangan Kerja sama dalam kerangka ASEAN dan Dialog Partner
 - f. Dalam rangka kerja sama dengan lembaga pemerintah dan Non pemerintah
 - g. Pengembangan Forum kerja sama Non ASEAN
 - c. Penyusunan Laporan Kerja Sama Antar Instansi/ Pemerintah/ Swasta/ Lembaga Terkait yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Hari Pangan Sedunia Ke-32 Tahun 2012
 - b. Pemantauan, Sosialisasi dan Pelaksanaan Proyek PHLN

- c. Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Lingkup Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait
 - d. Pelayanan Penyelenggaraan Penerimaan Kunjungan Tamu Asing Badan Internasional
 - e. Kegiatan Sekretariat Tim Nasional SKR
 - f. Operasional Sekretariat Nasional Program SKR
 - g. Sosialisasi Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri (BLN)
 - h. Workshop Kerja Sama Selatan - Selatan
- d. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sidang konferensi Internasional didalam/luar negeri
- a. Sidang – sidang Internasional
 - b. Penyelenggaraan Sidang Bilateral di dalam negeri sebagai Tuan Rumah
 - c. Sidang Special SOM AMAF ke-33
 - d. Sidang Working Group ASEAN-India
 - e. Sidang D-8 MM On Food Security
 - f. Sidang Working Group ASEAN-GCC
 - g. Kegiatan perubahan iklim
 - h. Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian (READ)
2. Layanan Perkantoran
- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
3. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran
- a. Penyusunan Program dan Rencana kerja (RKA-KL)
4. Laporan Kegiatan dan Pembinaan
- a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sekretariat Atase Pertanian
 - c. Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai
5. Kendaraan bermotor
- a. Pengadaan kendaraan bermotor
6. Perangkat pengolah data dan komunikasi

a. Pengadaan peralatan penunjang Operasional

II. Indikator Keberhasilan

Adapun yang menjadi indikator keberhasilan dari kegiatan yang ada di Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah terdiri dari beberapa hal yakni :

1. Dokumen pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama internasional dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
2. Dokumen Prioritas Kerja sama luar negeri bidang pertanian
3. Jumlah Nota Kesepakatan kerja sama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
4. Laporan pengembangan kerja sama luar negeri; dan
5. Laporan urusan tata usaha Pusat Kerja sama Luar Negeri dan Atase Pertanian

III. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Pusat Kerja sama Luar Negeri telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentang rincian tugas pekerjaan unit kerja eselon IV lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, dan penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

– Sasaran Strategis

Meningkatnya kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilatera

– Indikator Kinerja

- Realisasi kerja sama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian
- Jumlah dokumen nota kesepakatan kerja sama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral sebesar 12 dokumen
- Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 1 laporan
- Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sebesar 1 dokumen
- Jumlah dokumen pembinaan/penyelenggaraan kerja sama di atas pertanian Tokyo, Washington, Brussel dan Roma sebesar 4 dokumen
- Jumlah layanan perkantoran sebanyak 12 Bulan layanan

Guna mendukung capaian kinerja tersebut diatas Pusat Kerja Sama Luar Negeri didukung dengan anggaran dari DIPA TA 2012 sebesar Rp.24.357.234.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Pusat Kerja Sama Luar Negeri akan dijelaskan indikator kinerja yang digunakan, tingkat pencapaian dan analisis kinerja termasuk didalam permasalahan yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk antisipasi masalah yang dihadapi dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator.

Tabel Hasil Akuntabilitas Kinerja

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	PAGU	Realisasi Belanja	Persentase	Uraian Hasil
1.	Nota kesepakatan Kerja Sama Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan multilateral	4 Dok	4 Dok	14.723.496.000	13.520.733.868	91.83%	<ul style="list-style-type: none"> • BeBerapa MoU telah ditandatangani • Adanya sosialisasi di Pusat dan daerah terkait Kerja Sama Luar Negeri • Penyelenggaraan Sidang – Sidang Internasional
2.	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	5.850.452.000	4.645.624.555	79.41%	<ul style="list-style-type: none"> • Terbayarnya Gaji dan Tunjangan pegawai
3.	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	1 Dok	1 Dok	519.111.000	504.711.800	97.23%	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran dalam mendukung kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri
4.	Laporan Kegiatan dan Pembinaan	2 Lap	2 Lap	844.675.000	767.279.950	90.72%	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Dokumen Pembinaan Kegiatan Pusat Kerja Sama Luar Negeri
5.	Kendaraan Bermotor	2	2 Unit	557.000.000	543.900.000	97.64%	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kendaraan dinas pegawai/pejabat
6.	Perangkat Pengolah data dan Komunikasi	49 Unit	49 unit	687.500.000	687.454.000	99.99%	<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya aktivitas operasional kegiatan perkantoran
7.	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	50 Unit	50 Unit	200.000.000	197.505.000	98.75%	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Fasilitas sarana dan Prasaran perkantoran
Total				24.357.234.000	21.746.196.022	89.28 %	

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

- I. Nota Kesepakatan Kerja Sama pertanian dalam kerangka bilateral,
Pada Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdapat 3 Bentuk capaian Kerja Sama yang dihasilkan,

KERJA SAMA BILATERAL

Dalam kerangka Kerja Sama Bilateral pada tahun 2012 Kementerian Pertanian telah meningkatkan kerja sama dengan berbagai Negara antara lain :

1. Dengan Amerika Serikat, Kementerian Pertanian berkeinginan untuk bekerjasama di bidang bioteknologi. Untuk hal ini Badan Litbang Pertanian dan Kedutaan Besar AS sudah berkoordinasi dan sepakat akan membentuk *Center for agriculture and Food Security. Draft Arrangement on the Establishment of The Indonesia – US Advance Science Center for agriculture and Food Security* sudah disusun dan disampaikan kepada pihak AS melalui Kementerian Luar Negeri pada tanggal 19 April 2012. Sebagai tindak lanjut untuk *Agreement* ini diperlukan *Host Country Agreement* .

Selain itu kita juga gencar melakukan kampanye positif dan dialog untuk minyak kelapa sawit ke AS sehubungan akan dikeluarkannya NODA oleh EPA.

2. Dengan Brazil, Kementerian Pertanian akan bekerjasama untuk komoditi kedele dan tebu dengan EMBRAPA (Lembaga Penelitian di Brazil). Hal ini sesuai dengan tujuan swasembada kedele dan gula kita, dan Brazil memang mempunyai keunggulan untuk kedele di lahan masam dan juga mempunyai varietas tebu yang mempunyai rendemen tinggi selain itu teknologi hasil samping gula tebu di Brazil juga cukup tinggi yang anantara lain memproduksi bioethanol. Untuk hal ini sudah disusun draft MOU dengan EMBRAPA dan final draft sudah siap ditandatangani.
3. Dengan Canada kedua Menteri Pertanian sudah mempunyai *Letter of Intent (LOI)* kerjasama bidang pertanian yang telah ditandatangani

tahun 2010. Kanada mempunyai keunggulan dibidang teknologi peternakan untuk itu dalam rangka mendorong swasembada daging perlu dilakukan juga kerjasama dengan Kanada. Pada tahun 2012 Tim Kanada telah berkunjung ke Indonesia untuk mengidentifikasi prioritas kerjasama kedua belah pihak dan sepakat akan meningkatkan LOI menjadi MOU.

4. Dengan Jerman, Kementerian Pertanian mempunyai keterkaitan erat, setiap tahun dilakukan *Agriculture Minister's Summit* dengan membahas isu-isu yang terkait dengan pangan dan pertanian. Untuk tahun 2012 ini telah dilakukan Pertemuan ke-4 Agriculture Ministers' Summit 2012 di Berlin pada tanggal 19 – 22 januari 2012. Substansi yang dibicarakan adalah: (a) kelestarian sumberdaya alam, untuk produksi pertanian dan pangan berkelanjutan; (b) penerapan teknologi yang adaptif, spesifik dan berkelanjutan; (c) upaya yang sistematis untuk mengurangi kehilangan hasil dan produk yang terbuang (*losses and waste products*); (d) peningkatan investasi dalam pengembangan infrastruktur (e) peranan perempuan dalam peningkatan ketahanan pangan. Pemerintah Jerman menawarkan kepada Indonesia untuk mengeksport produk pertanian organik dan produk pertanian tropik
5. Rusia juga merupakan salah satu negara yang cukup berpotensi untuk kerjasama bidang pertanian. Selain itu Rusia juga berminat untuk mengimpor teh, kopi dan coklat dari Indonesia. Dibidang Teknologi, Kementerian Pertanian tertarik untuk bekerjasama dalam bidang Food Preservation technology dan seed processing method radiating technology. Untuk hal ini MOU bidang Pertanian antara Indonesia dan Rusia sudah dalam tahap final draft.
6. Pertemuan Bilateral antara Menteri Pertanian RI dengan Menteri Pertanian Selandia Baru dinisiasi oleh pihak Selandia Baru. Isu-isu yang dibahas antara lain terkait dengan penutupan sementara pelabuhan Tanjung Priok bagi produk impor hortikultura. Pihak Indonesia menjelaskan kepada pihak Selandia Baru bahwa penutupan tersebut dilakukan untuk sementara waktu, dikarenakan sedang

dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana karantina pelabuhan.

Disamping itu, dibahas pula mengenai tindak lanjut MoU bidang pertanian RI-Selandia Baru yang telah ditandatangani April 2012 dan dilanjutkan dengan pembahasan work plan dalam pertemuan working group pertanian di Jakarta.

Pada tahun 2012 Indonesia/Kementerian Pertanian telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan 2 Negara (New Zealand dan Mongolia) dan membahas tindak lanjut kesepakatan dengan 9 negara (Selandia Baru, Vietnam, Kamboja, Korea, Jepang, china, Srilanka, Namibia, Tanzania).

7. Kerjasama Selatan – Selatan.

- Bulan Maret 2012, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BAPPENAS dan disponsori oleh IDB telah mengadakan *Training on Small Dam and Irrigation Network in Indonesia* bagi pegawai pertanian Nigeria dan pada tanggal 12-24 juni 2012 juga telah dilaksanakan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan terpadu dalam program *Indonesian Agricultural Support Program (IASP)* kerjasama Kementerian Pertanian RI dengan Kedutaan Besar di Abuja dan African Leadership Magazine Group di Subang, Bandung, Sukabumi dan Bogor.
- Telah dilaksanakan Joint Agriculture Cooperation Committee ke-2 tanggal 5-8 Desember 2012 di Dar es Salaam, Tanzania. Selain melaporkan kemajuan kegiatan pada pertemuan ke-1 di Bogor, Jawa Barat pada pertemuan ini kedua belah pihak kembali menyatakan keseriusannya untuk tetap meningkatkan kembali Kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian; penelitian dan pengembangan dan akses pasar.
- Sesuai komitmen Pemerintah Indonesia untuk membantu pertanian Madagaskar, tahun 2012 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian kembali mengirimkan Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi

Pasca Panen (Ir. Suismono, Tenaga ahli pada BB Litbang Pasca Panen) untuk memberikan pelatihan di Madagaskar.

- Pertemuan Bilateral antara Menteri Pertanian RI dengan Menteri Pertanian Selandia Baru dinisiasi oleh pihak Selandia Baru. Isu-isu yang dibahas antara lain terkait dengan penutupan sementara pelabuhan Tanjung Priok bagi produk impor hortikultura. Pihak Indonesia menjelaskan kepada pihak Selandia Baru bahwa penutupan tersebut dilakukan untuk sementara waktu, dikarenakan sedang dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana karantina pelabuhan.
- Disamping itu, dibahas pula mengenai tindak lanjut MoU bidang pertanian RI-Selandia Baru yang telah ditandatangani April 2012 dan dilanjutkan dengan pembahasan work plan dalam pertemuan working group pertanian di Jakarta.

8. Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Australia, Mr. Kevin Rudd, Jakarta, 10 Januari 2012.

Courtesy Call Menlu Australia membahas isu-isu terkait kerjasama perdagangan komoditas pertanian yang meliputi peternakan dan produk pertanian lainnya.

9. Kunjungan Kehormatan Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Menteri Perdagangan Australia, Jakarta 21 Maret 2012

Tujuan dari pertemuan tersebut adalah dalam rangka membahas isu perdagangan sapi hidup dan daging sapi dari Australia ke Indonesia. Kementerian Pertanian menyambut baik ekspor buah manggis yang akan segera dapat masuk ke Australia. Sedangkan untuk kerjasama bidang peternakan, Kementan meminta industri / pengusaha Australia dapat bekerjasama dengan asosisasi peternak dan pengusaha Indonesia untuk mengembangkan sapi.

10. Penandatanganan MOU on Agriculture Cooperation Indonesia-New Zealand, Jakarta, 17 April 2012

MOU telah ditandatangani di hadapan Presiden RI dan Perdana Menteri New Zealand di Istana Negara. MOU tersebut merupakan payung hukum kerjasama bilateral bidang pertanian antara Indonesia dan New Zealand. Area yang dikerjasamakan antara lain :

- a. Kerjasama dan pertukaran informasi mengenai bidang pertanian;
- b. Pertukaran ahli di bidang terkait;
- c. Kerjasama Teknis dalam bidang Pembangunan Pertanian;
- d. Promosi Bersama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor pertanian;
- e. Area kerjasama lainnya

11. Kunjungan Kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Beijing 24-26 April 2012

Melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China/AQSIQ, Mr. Zhi Shuping dan Penandatanganan Protokol Ekspor Sarang Walet dari Indonesia ke RRT.

12. Penandatanganan MOU on Food and Agriculture Cooperation Indonesia dan Mongolia, 16 September 2012

MOU ditandatangani di UlaanBatar oleh Menteri Luar Negeri, pada tanggal 6 September 2012 pada saat Kunjungan Presiden RI ke Mongolia dalam rangkaian Kunjungan Presiden RI ke Vladivostock Rusia dalam KTT APEC.

13. Kunjungan Minister of Trade New Zealand, Mr. Tim Groser, 16 Oktober 2012

Courtesy Call Minister of Trade, Hon. Tim Groser dengan Menteri Pertanian RI. Pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan kerjasama bidang pertanian dalam *Memorandum of Understanding on Agriculture Cooperation*(MOU) Indonesia-New Zealand.

14. KTT ASEAN, 18-19 Nopember 2012, Phnom Phen Kamboja

Sebagai delegasi Presiden dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 dan pertemuan Bilateral Indonesia-Kamboja. Melakukan kunjungan lapang ke lokasi petani dan penggilingan padi di Phnom Penh.

15. KTT D-8, 21-22 Nopember 2012 di Islamabad Pakistan

Sebagai delegasi mendampingi Presiden dalam Pertemuan Tingkat Tinggi D-8. Melakukan Pertemuan Bilateral dengan *Federal Minister on National Food Security and Research* Pakistan dan sepakat melakukan kerjasama bilateral bidang pertanian melalui MOU, serta mengunjungi Pameran EXIBISI 2012.

16. Korea

Dalam rangka dukungan terhadap program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang dicanangkan oleh Presiden SBY, Kementerian Pertanian telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) on Agriculture* dengan pihak Korea pada tanggal 26 Nopember 2011 di Jakarta. Kesepakatan dalam MoU tersebut memberikan hasil berupa:

- a) Bantuan hibah pemerintah Korea kepada pemerintah Indonesia sebesar 1.700.000 KRW melalui proyek Pilot Project *Mechanized Rice Farming Complex* in Indonesia (Mekanisasi Pertanian). Pelaksanaan proyek tersebut direncanakan di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jateng pada awal bulan Januari 2013.

- b) Rencana investasi pemerintah Korea Selatan dibidang *Agro-based Multi Industry Cluster (MIC)* (kawasan pertanian terpadu). Pada saat ini Kemtan mengusulkan 2 lokasi yaitu Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan.

17. Kegiatan Pemanfaatan CF-SKR 2012

Benefit

Terselenggaranya pelaksanaan program CF-SKR Tahun Anggaran 2012 yang meliputi:

- a). Terdistribusinya pupuk KCL sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
- b). Terbayarnya kewajiban End User untuk melakukan pembayaran Pupuk KCL sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disepakati.
- b. Termonitornya dan terevaluasinya kegiatan Bantuan Program CF-SKR Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

Kerja Sama Regional

Dalam kerja sama regional Indonesia telah aktif dalam pertemuan baik sebagai tuan rumah maupun menghadiri pertemuan di Negara lain. Tahun 2012 Indonesia telah menjadi tuan rumah untuk pertemuan Special SOM AMAF ke33 Dan Special SOM AMAF +3 ke 11, Selain itu juga sebagai tuan rumah pertemuan ASEAN – India Working Group dan ASEAN GCC

I. KERJASAMA ASEAN

Beberapa hal penting dari kesepakatan ASEAN tahun 2012 adalah :

1. Prioritarisasi Elemen Kunci dan Target 2015.
2. Para Menteri menyambut baik proses yang sedang berjalan dan capaian yang signifikan kerjasama ASEAN di bidang pangan, pertanian dan kehutanan. Guna mencapai target integrasi dan *ASEAN Economic Community Blueprint*, para menteri sepakat untuk mengupayakan berbagai strategi dan inisiatif, menyusun prioritas dan target yang hendak dicapai, mengarahkan seluruh badan dibawah AMAF agar bersinergi dan saling melengkapi untuk mempercepat tercapainya AEC pada 31 Desember 2015.

Kemajuan implementasi *ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework* dan *Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security (SPA-FS (2009-2013))*, juga mulai berlakunya *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Agreement*.

3. Kerjasama dengan Dialog dan Development Partner antara lain

Perpanjangan *MOU ASEAN-China*, dan rancangan *MOU on Forestry*.

Kesepakatan Para menteri AMAF+3 dalam Memperkuat keamanan pangan, Pengembangan Energi Biomas, Penanganan Hutan Yang berkelanjutan, Mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim, Pengontrolan kesehatan dan Penyakit Hewan, dan isu-isu lintas sektor.

4. Pada tahun 2012 Indonesia juga telah melaksanakan Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian D-8 Bidang Ketahanan Pangan ke-3, 3-5 Oktober 2012, di Nusa Tenggara Barat.

Dari rangkaian pertemuan tersebut telah dihasilkan *Mataram Initiatives*, yaitu kesepakatan bersama Menteri-Menteri mengenai Program Ketahanan Pangan D-8, sebagai berikut:

- a. Komitmen untuk mengatasi volatilitas harga pangan dan meningkatkan produksi pangan global, serta strategi untuk memberantas kelaparan dan kurang gizi.
- b. Komitmen untuk memberikan prioritas dalam meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat pedesaan dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan.
- c. Apresiasi terhadap rencana pendirian proyek bank benih nasional, dan mendesak agar koordinasi, harmonisasi regulasi, evaluasi, dan pertukaran benih diantara negara anggota ditingkatkan.
- d. Peningkatan kerjasama teknis dalam aplikasi dan harmonisasi standar pupuk, potensi penelitian, dan kerjasama teknologi untuk pupuk komersial dan perdagangan intra kawasan. Untuk itu, para menteri mendesak agar negara-negara anggota D-8 untuk menyiapkan data base dan informasi tentang standar pupuk diantara negara anggota.
- e. Menggarisbawahi pentingnya isu kelautan dan perikanan dalam mendukung keamanan pangan dan peluang perdagangan antar negara. Selain itu, ditegaskan perlunya transfer teknologi,

program pelatihan, promosi kelautan dan perikanan, serta investasi.

- f. Peresmian website Pusat Informasi Pakan Ternak D-8 (*D-8 Animal Feed Information Center*) sebagai sumber data dan informasi mengenai pakan dan bahan pakan ternak di kawasan D-8.
 - g. Selain itu, para menteri menyetujui dibentuknya kelompok kerja teknis dalam rangka meningkatkan produksi pakan ternak, yaitu: *technical working group on palm kernel cake, rice bran, dan cassava*.
5. APEC Food Security Ministerial Meeting (30-31 Mei 2012) Kazan Rusia
1. Dalam *Food Security Ministerial Meeting* (FSMM) pada tanggal 30-31 Mei 2012, para Ekonomi APEC menyampaikan pandangan mereka terhadap tema yang diusung Rusia, yaitu "*Ensuring Food Security in the APEC Economics. Present Day Food Security Challenges in the APEC Region: Solutions and Prospects*".
 2. Pokok bahasan utama pada pertemuan FSMM kali ini adalah mengenai pentingnya investasi di bidang pertanian yang didukung dengan *partnership* yang baik antara pemerintah dan pihak swasta. Beberapa Ekonomi seperti Korea, Peru dan PNG mengangkat pentingnya *sustainable management of ocean and marine resources* sebagai salah satu sumber utama ketahanan pangan. Peran penting petani sebagai pelaku utama di bidang pertanian juga diangkat oleh beberapa Ekonomi seperti Jepang dan Kanada.

Pada Tahun 2013 nanti Indonesia sebagai Ketua APEC dan menjadi tuan rumah pertemuan APEC Forum/Sub Forum yang terkait dengan isu pertanian adalah PIFS, ATCWG dan HLPDAB.

KERJASAMA MULTILATERAL

1. Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia ke-32 tanggal, 18-21 Oktober 2012 di Palangkaraya Kalimantan Tengah

Pelaksanaan hari Pangan Sedunia ke-32 tanggal 18 – 21 Oktober 2012 di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pada tahun ini, peringatan HPS mengusung tema internasional yaitu “*Agricultural Cooperatives-Key to Feeding The World*” dan tema nasional yaitu “Agroindustri Berbasis Kemitraan Petani Menuju Kemandirian Pangan”.

Rangkaian kegiatan HPS terdiri dari: 1. Seminar, 2. Pengabdian Masyarakat berupa pemberian alsintan, bibit dan pelatihan manajemen untuk kelompok tani, 3. Gelar teknologi, 4. Acara Puncak HPS, dihadiri oleh Wakil Presiden RI dan Menko Kesra, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Duta Besar Negara Sahabat, FAO Representative untuk Indonesia dan wakil dari provinsi di Indonesia, Dubes dan wakil kedutaan Negara sahabat. Gapoktan dan undangan, yang dibuka oleh Wakil Presiden RI.

2. Indonesia aktif menghadiri pertemuan multilateral antara lain pertemuan IFAD, FAO, G-20, OECD dan UNFCC

Saat ini Indonesia melaksanakan beberapa proyek bantuan IFAD,FAO,IDB Selain Kerjasama dengan lembaga pemerintah Selama tahun 2012, Kementerian Pertanian telah mengembangkan Kerjasama dengan sejumlah Lembaga Non Pemerintah yang meliputi ACTED, Mercy, CYMMIT, dan MICRA.

a. Kerjasama ACTED dengan Kementerian Pertanian dimulai pada tahun 2009 dengan ditandatanganinya MoU kerjasama antara Ditjen Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian (PPHP) dengan ACTED mengenai Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, serta Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Peran Pertanian dan Mutu Produk Perdesaan (*Rural Development for Poverty Alleviation, Sustainable Livelihoods and Social Welfare Through Agriculture Interventions and Rural Products Quality Improvement*) di Jakarta dengan periode kerjasama selama 3 tahun hingga tanggal 10 Desember 2012.

- b. Kerjasama Mercy USA dengan Kementerian Pertanian dimulai pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan ditandatanganinya MoU antara Pusat Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal dengan Mercy USA dengan ruang lingkup Kerjasama meliputi: (i) Peningkatan produksi dan populasi ternak melalui ketentuan produk yang tepat, peningkatan kapasitas terhadap kemampuan beternak bagi para petani dan pekerja pertanian sehingga dapat meningkatkan kemampuan produksi pertanian; (ii) Peningkatan kemampuan petani dalam mengatur kegiatan pertanian berkelanjutan/agribisnis melalui kegiatan pelatihan dan program magang; dan (iii) Mendukung upaya Pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pertanian daerah melalui pelatihan-pelatihan perencanaan bisnis *in-farm* dan *off-farm* dan manajemen agribisnis.

Kegiatan Kerjasama tersebut telah dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Barat dan akan berlangsung hingga 6 Agustus 2013.

- c. Perkembangan Kerjasama dengan CIMMYT

The International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) adalah suatu lembaga penelitian *non-profit* dengan fokus kegiatan pada penelitian dan pengembangan komoditas sereal yang bernaung di bawah *the Consultative Group on International Agricultural Research* (CGIAR). Kerjasama Kementerian Pertanian dengan CIMMYT telah diinisiasi sejak tahun 1981. Dalam perkembangannya kerjasama tersebut menjadi semakin intensif dengan ditandatanganinya MoU antara Badan Litbang Pertanian dengan CIMMYT pada tanggal 15 Juni 2010 untuk periode 5 tahun.

Kerjasama dengan CIMMYT telah memberikan manfaat yang nyata dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan melalui pengembangan berbagai jenis varietas gandum dan jagung yang memiliki produktivitas lebih tinggi dan sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2012, CIMMYT berencana untuk mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia yang sekaligus berfungsi sebagai kantor regional untuk kawasan Asia Tenggara. Lokasi kantor yang dipilih adalah pada Balai Penelitian Tanaman Sereal, Badan Litbang

Pertanian di Maros, Makassar, yang selama ini merupakan Unit Kerja pelaksana kerja sama dengan CIMMYT.

Rencana pendirian Kantor Perwakilan CIMMYT di Indonesia mendapatkan sambutan positif dari Kementerian Pertanian. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pada saat ini sedang dibahas konsep *Host Country Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan pihak CIMMYT.

d. **Perkembangan Kerjasama dengan MICRA**

Microfinance Innovation Center for Resources and Alternatives (MICRA) adalah lembaga non pemerintah lokal yang didirikan pada tahun 2006 dengan fokus kegiatan mengembangkan sektor keuangan mikro di Indonesia, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan mikro.

Pada tahun 2012, MICRA telah ditunjuk oleh Ford Foundation untuk menjadi pengelola program inovasi dalam pembiayaan pertanian. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada TA 2013 bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.

3. Kerjasama dengan OECD untuk Review Kebijakan Pertanian

Kegiatan review kebijakan pertanian di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian kegiatan review yang dilakukan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) di sejumlah negara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi tentang kebijakan pertanian yang dapat diperbandingkan antar negara secara internasional. Cakupan kajian tersebut meliputi perhitungan estimasi dukungan produsen dan konsumen (*producers/consumers support estimates*), serta sejumlah isu kebijakan yang bersifat spesifik untuk setiap negara.

Pelaksanaan review kebijakan pertanian di Indonesia telah dilakukan oleh Tim OECD bekerjasama dengan Tim dari Kementerian Pertanian yang dibentuk secara khusus melalui SK Menteri Pertanian No. 848/Kpts/OT.160/2/2011 tertanggal 8 Februari 2011. Pelaksanaan kajian tersebut berlangsung selama kurang lebih satu tahun mulai Bulan April 2011 sampai Bulan Oktober 2012. Tahapan akhir dari kegiatan tersebut adalah Peluncuran Buku dan Workshop untuk

sosialisasi hasil kajian yang telah dilaksanakan pada tanggal 10-11 Oktober 2012.

4. Kegiatan Perubahan Iklim

Kegiatan perubahan iklim yang telah dilaksanakan hingga bulan Juni tahun 2012 ini adalah:

- a. Mempersiapkan bahan Sidang KTT Rio+ 20 yang diselenggarakan pada tanggal 20 s.d 22 Juni 2012 di Rio de Janeiro, Brazil.
- b. Supervisi kegiatan lapang terkait penanganan dampak perubahan iklim di daerah Sukamandi dan Karawang Propinsi Jawa Barat.

5. Kajian Kebijakan Terkait Proyek-Proyek Berbantuan IFAD

Kegiatan kajian kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan merupakan sub komponen dari Proyek *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ) yang mendapatkan dukungan pendanaan dari *International Fund for Agricultural Development* (IFAD).

Pada TA 2012 ini akan dilaksanakan 2 (dua) paket kajian dengan topik "Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Infrastruktur Perdesaan" serta "Penguatan Keuangan Mikro".

II. Layanan Perkantoran

Tersedianya dan terfasilitasinya kegiatan operasional perkantoran Pusat Kerjasama Luar Negeri yang terdiri atas Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dan pembayaran Tunjangan Kinerja

III. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan anggaran

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran dalam mendukung kegiatan Pusat Kerjasama Luar Negeri yang menghasilkan Dokumen Penyusunan program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Tahun 2013.

IV. Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Tersedianya Dokumen Pembinaan Kegiatan Pusat Kerjasama Luar Negeri yang terdiri dari Evaluasi/laporan kegiatan, sub Bagian Tata Usaha dan Sekretariat Atase Pertanian, Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai, Kesekretariatan IFAD, Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender, Kajian Kebijakan Penguatan Keuangan Mikro,

Kenaikan Pangkat, proses administrasi perjalanan dinas luar negeri , yang terdiri dari penugasan pejabat/pegawai ke luar negeri sebanyak 1.584 orang terdiri dari mengikuti pelatihan/ training sebanyak 355 orang, mengikuti workshop/seminar 304 orang, menghadiri pertemuan/sidang sebanyak 702 orang, melakukan kunjungan kerja sebanyak 205 orang, mengikuti program pendidikan Master Sebanyak 11 Orang dan S3 Sebanyak 7 Orang

V. Kendaraaan Bermotor

Pengadaan Kendaraan bermotor sebanyak 2 (dua)unit

VI. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi

VII. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Kerjasama Luar Negeri pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Pusat Kerjasama Luar Negeri pada tahun 2012 mendapat anggaran sebesar Rp.24.357.234.000,- Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 21.746.196.022, atau sebesar 89,28%. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat KLN sebanyak 41 Kegiatan pada Tahun 2012 dengan rincian kegiatan serta prosentase capaian anggaran sebagai berikut; **(1)**. Peningkatan Kerjasama Internasional melalui kerangka Bilateral dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 97,92%, **(2)**.Penyusunan bahan perjanjian dan posisi kerjasama bilateral dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 76,35% **(3)**.Kegiatan Sekretariat Tim nasional SKR, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 82,36% **(4)**.Operasional Sekretariat Nasional Program SKR, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 94,33% **(5)**.Workshop Program pembangunan pertanian kerjasama selatan – selatan, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 37,70%

(6). Penyelenggaraan Sidang Bilateral di dalam negeri sebagai tuan rumah, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 85, 91%, (7). Data Statistik, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 74,63%, (8). Peningkatan kerjasama Internasional melalui kerangka multilateral, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 93,69%, (9). Kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 73,49% (10). Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia Ke-32 tahun 2012, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 87, 16 % (11). Pemantauan, sosialisasi dan pelaksanaan PHLN, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 88,84%, (12). sosialisasi Pemanfaatan PHLN dan BLN, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar, 96,01%, (13). Kegiatan perubahan iklim, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 67,28%, (14). Kesekretariatan IFAD, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 87,05%, (15). Kajian pengelolaan sumber daya alam & infrastruktur pedesaan dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 91,32%, (16). Kajian Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro sektor pertanian, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 89,23%, (17). Evaluasi/Laporan Kegiatan, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 91,06% (18). Peningkatan kerjasama intern melalui kerangka bidang regional, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 95,63% (19). pengembangan kerjasama intra kawasan, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 76,70% (20). pengembangan kerjasama dalam kerangka ASEAN & Dialog Partner, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 90,69%, (21). Pengembangan forum Kerjasama Non ASEAN, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 87,41%, (22). Sidang Special SOM AMAF ke—33 dan special Som AMAF +3 ke-11, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 99,85%, (23). Sidang Working Group ASEAN-GCC, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 98%, (24). Sidang D-8 On Food Security Ke-3 Tahun 2012, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 98,99%, (25) Sidang Working Group ASEAN-India, dengan prosentase rencana tingkat

capaian sebesar 97,85%, **(26)**. Kelancaran administrasi, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 98,69% , **(27)**.penyusunan laporan pengembangan hubungan kerjasama luar negeri bidang bilateral, regional dan multilateral, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 99,50% **(28)**. administrasi kegiatan, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 63,99%, **(29)**.Penyusunan laporan kerjasama antar instansi/pemerintah/swasta/lembaga terkait, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 75,66% **(30)**. fasilitasi perjalanan dinas luar negeri lingkup kementan dan instansi terkait, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar, 76,45%, **(30)**.penyusunan laporan penyelenggaraan sidang konferensi internasional didalam/luar negeri, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 56,38%, **(31)**.sidang – sidang internasional, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar, 79,70% **(32)**. penyusunan program dan Rencana kerja (RKA-KL) Pagu anggaran (pagu Sementara), dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 93,65% ,**(33)**.Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKA-KL) Alokasi Anggaran (Pagu definitif), dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar, 99,12%, **(34)**.Sub Bagian Tata Usaha, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 93,12, **(35)**.Sekretariat atase pertanian, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 70,91%, **(36)**.pembinaan mental dan karakter pegawai, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar,93,03 % , **(37)**. pembayaran gaji dan tunjangan, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar,78,04%, **(38)**. penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 85,32%, **(39)**.pengadaan kendaraan bermotor, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 97,65% , **(40)**.Belanja Barang Operasional Pusat KLN, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 99,99% , **(41)**.Pengadaan Meubeler. dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 98,75%.

BAB IV

ANALISIS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA KEGIATAN

Analisis akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pencapaian kinerja kegiatan melalui program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai mana ditetapkan dalam rencana strategik. Serta perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya peningkatan kinerja daripada Pusat Kerjasama Luar Negeri cukup baik terlihat dengan adanya peningkatan jumlah Kerjasama baru yang dihasilkan terlihat dengan adanya penandatanganan MoU dengan New Zealand dan Mongolia, Tindak lanjut MoU dengan Negara – Negara mitra lainnya yaitu: Tanzania, India dan Iran, Sudan, New Zealand, Task force dengan Korea dalam pengembangan MIC dan Machienary Project, adanya Forum baru dengan Tanzania, Indonesia – Jacc ke-2, Seminar Pemanfaatan PHLN dan BLN di Batam dan Jogja, Jumlah proses registrasi proyek yang meningkat sebanyak 4 Buah usulan blue Book Bappenas, 22 Register Kemenkeu, 32 Rekomendasi tenaga ahli serta pelaksanaan event /kegiatan internasional yang mana Indonesia bertindak sebagai Tuan Rumah diantaranya adalah; Pertemuan The 2nd ASEAN-India WGAFC, 6-8 Maret 2012, di Palembang, Pertemuan Special SOM-AMAF ke-33, 9-12 Juli 2012, di Yogyakarta, Pertemuan The 2nd ASEAN-GCC Working Group on Food Security and Agriculture Investment, 4-6 September 2012, di Padang, Pertemuan The 3rd D-8 Agricultural Ministerial Meeting on Food Security, 3-5 Oktober 2012, di Mataram, dan Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia ke-32 di Palangkaraya yang berlangsung dengan Sukses. Serta adanya Pertemuan Koordinasi dengan Atase Pertanian di Bulan Desember

2012 untuk melakukan evaluasi dan peningkatan atas situasi dan kondisi yang terjadi di Atase Pertanian saat ini.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam hal akuntabilitas keuangan, di Tahun 2012 terlihat bahwa struktur anggaran yang lebih besar dibanding Tahun lalu, dimana hanya sebesar Rp. 16.565.659.000, dan meningkat menjadi sebesar Rp. 24.357.234.000 dan diikuti dengan realisasi yang meningkat pula yang semula hanya sebesar 86, 81 % menjadi 89,28%, hal ini menunjukkan keseriusan Pusat Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan kegiatan secara optimal, efisien dan efektif. anggaran dapat terlaksana dengan baik akan tetapi tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kegiatan realisasi anggaran kurang dapat berjalan dengan baik diantaranya adalah : Workshop Program pembangunan pertanian kerjasama selatan – selatan, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 37,70%, penyusunan laporan penyelenggaraan sidang konferensi internasional didalam/luar negeri, dengan prosentase rencana tingkat capaian sebesar 56,38%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembinaan kerjasama luar negeri merupakan fungsi yang strategis dalam rangka meningkatkan dan membangun kerjasama dibidang Pertanian dalam kerangka bilateral, regional, multilateral dan Badan PBB untuk pangan pertanian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian pada tahun 2012 telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam menunjang program pembangunan pertanian dengan keberhasilan terjalannya kerjasama luar negeri saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam bidang teknis dan ekonomi pertanian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri tahun 2012 sangat **efisien dan efektif**, Walaupun serapan anggaran yang dihasilkan belum sepenuhnya mencapai target dikarenakan Pengembangan kerjasama luar negeri bidang pertanian sangat terkait dengan berbagai instansi baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dalam penyelesaian dokumen – dokumen kerjasama memerlukan proses dan negosiasi yang jadwalnya sering terkendala karena tergantung pada kesiapan negara mitra, sehingga sering terjadi kegiatan tersebut batal dilaksanakan dan diharapkan untuk masa yang akan datang kondisi ini dapat segera diantisipasi dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

B. Saran dan Tindak Lanjut

Pada masa yang akan datang diharapkan fungsi maupun peranan dari pusat kerjasama luar negeri dapat ditingkatkan lebih baik agar pengembangan kerjasama luar negeri dan percepatan program pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN I. Rencana Strategis (RS)

LAMPIRAN II. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

LAMPIRAN IV. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

LAMPIRAN V. Data Kepegawaian Biro Kerjasama Luar Negeri tahun 2010

LAMPIRAN VI. Data Keuangan Biro Kerjasama Luar Negeri, Tahun 2010

LAMPIRAN VII. Struktur Organisasi Biro Kerjasama Luar Negeri